



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BIRO KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI SANTOSO
2. Jabatan : ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA
3. NHK : 860577

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.970.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/130 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 999.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC TURBO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, HUSQYVARNA TE 300 I ROCKSTAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 600.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 295.044.965

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.764.044.965



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.764.044.965

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.